



Prosiding Peluncuran Hasil Studi

Ketimpangan Pajak & Gender di Indonesia

Judul: Prosiding Peluncuran Hasil Studi Ketimpangan Pajak & Gender di Indonesia

Penyusun: Yudith Sari Dewi

Editor: Titi Soentoro

Penata letak: Renie Aryandani

Diterbitkan pertama kali pada 2025 oleh Aksi!for gender, social, and ecological justice

Jl. Kalibata Tengah XVII B No.25, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740 sekretariat@aksiforjustice.id
www.aksiforjustice.id

Publikasi ini diproduksi dengan pendanaan bersama dari Uni Eropa. Isinya sepenuhnya merupakan tanggung jawab Aksi! dan tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa.

KATA PENGANTAR

Aksi! *for gender, social and ecological justice* (Aksi!) adalah organisasi yang salah satu programnya adalah Keadilan Ekonomi sebagai upaya menguatkan suara perempuan komunitas dalam perjuangan melawan ketidakadilan gender dan ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi negara yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam dan buruh, utang luar negeri, serta investasi asing langsung, merupakan akar persoalan proses pemiskinan. Model ini terus mendorong ekstraksi dan eksploitasi sumberdaya alam dan manusia. Akibatnya, kesenjangan ekonomi yang mendorong feminisasi kemiskinan di Indonesia.

Feminisasi kemiskinan akibat ketimpangan ekonomi secara struktural tidak banyak menjadi perhatian publik karena putaran informasi mengenai persoalan ini tidaklah banyak. Dibutuhkan banyak perhatian dan diskusi publik mengenai fenomena feminisasi kemiskinan ini, dimana salah satunya adalah pajak yang menghasilkan ketimpangan ekonomi dan gender di Indonesia.

Aksi! percaya bahwa solusi untuk mengatasi krisis keadilan ekonomi perlu melibatkan reformasi pajak yang progresif sehingga dapat mengurangi kesenjangan pendapatan, peningkatan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan. Namun, solusi ini menuntut pendekatan yang holistik dan kerjasama lintas sektor untuk menciptakan dasar ekonomi yang lebih inklusif dan adil.

Untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak kebijakan perpajakan terhadap ketimpangan gender dan ekonomi, Aksi! melakukan peluncuran hasil kajian *“Ketimpangan gender dan ekonomi di Indonesia dari perspektif perpajakan dan arus uang keluar yang tidak sah”*. Peluncuran buku ini menghasilkan masukan dari berbagai organisasi dan perspektif untuk memperkaya hasil kajian.

Jakarta, 2024

Aksi! for gender, social, and ecological justice

RINGKASAN EKSEKUTIF

Aksi! for gender, social, and ecological justice menyelenggarakan peluncuran buku hasil kajian dan diskusi *“Ketimpangan gender dan ekonomi di Indonesia dari perspektif perpajakan dan arus uang keluar yang tidak sah”* pada 7 November 2024 di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan membangun sebuah pemahaman mengenai dampak perpajakan terhadap ketimpangan ekonomi dan gender yang terjadi di Indonesia.

Peluncuran buku hasil kajian dihadiri oleh 39 orang peserta dari NGO/CSO, perempuan pemimpin, kelompok muda, jurnalis/media, dan umum. Rio Ismail dan Marhaini Nasution pemapar dari Aksi! for gender social and ecological justice yang menjelaskan ketimpangan gender dan ekonomi di Indonesia dari perspektif perpajakan dan arus uang keluar yang tidak sah. Selanjutnya, 6 orang dari NGO/CSO memberi tanggapan sesuai dengan perspektif fokus isu masing-masing organisasi yakni; Jaya Darmawan dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Uli Arta Siagian dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Meliana Lumbantorum dari PWYP Indonesia, Danang Widoyoko dari Transparency International Indonesia (TII), Armayanti Sanusi dari Solidaritas Perempuan (SP) dan Samira Hanim dari The Prakarsa.

Peluncuran hasil kajian tersebut melahirkan pandangan dan pengetahuan baru mengenai pajak dalam perspektif perempuan. Kajian ini memperkaya kajian pajak yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan memperkuat advokasi keadilan pajak di Indonesia. Selain itu membantu perempuan akar rumput memahami dan menganalisa keterhubungan antara pajak dan kehidupan perempuan sehari-hari. Pasca peluncuran, hasil kajian tersebut akan dijadikan salah satu bukti dalam judicial review UU pajak.

I. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan penyumbang utama penerimaan negara yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan dengan tujuan mensejahterakan warganya, seperti menyediakan tempat tinggal yang layak, pendidikan yang memadai sehingga warganya mampu memenuhi kebutuhan tempat kerja dan karir, sarana kesehatan yang baik dan murah, dan lainnya. Pembiayaan negara juga sangat penting artinya bagi pemenuhan hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, bahan makanan murah dan sehat, akses ke modal dan lapangan kerja, dan lainnya.

Namun realitas tidak menunjukkan hal tersebut terjadi karena negara gagal mengelola pajak untuk kepentingan warganya. Penerimaan pajak tidak pernah mencukupi pengeluaran/belanja negara. Terjadi defisit anggaran di APBN setiap tahunnya. Rata-rata defisit anggaran selama periode 2020- 2024, misalnya, melambung dua kali lipat menjadi Rp 638,48 triliun per tahun akibat adanya pandemi covid-19.¹

Peningkatan porsi utang semakin membebankan fiskal maupun devisa sehingga dapat mengancam keberlanjutan keuangan negara.² Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah terus mengambil utang baik dari luar maupun dalam negeri. Per Maret 2024 utang pemerintah sudah mencapai Rp 8.262,10 triliun.³ Tahun 2024 alokasi pembayaran bunga utang sebesar 497,3 triliun. Bahkan pada tahun 2025 jatuh tempo utang pemerintah sebesar Rp 800,33 triliun.⁴

Untuk meningkatkan pendapatan dan rasio pajak pemerintah berencana akan menaikkan pajak, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% ke 12% yang akan berlaku di awal 2025.⁵

Meskipun demikian pendapatan yang masuk ke kas negara tetap saja kecil dan tidak mampu membiayai belanja negara. Situasi ini diakibatkan oleh banyaknya sumber pendapatan negara yang hilang akibat korupsi, pencucian uang,

¹ <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-93.pdf>

² Ibid, hal 9.

³

Sumber:

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20240507/9/1763549/utang-pemerintah-maret-2024-turun-ke-rp826210-triliun-setara-3879-terhadap-pdb>

⁴

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240610065513-4-545118/utang-jatuh-tempo-bengkak-di-era-prabowo-2025-2028-tembus-rp3125-t>

⁵ <https://www.detik.com/properti/berita/d-7545113/bangun-rumah-sendiri-kok-kena-pajak>.

penyuapan, penghindaran dan penggelapan pajak, penyelundupan, berbagai jenis penyalahgunaan jabatan, serta rekayasa pajak seperti *tax engineering*.⁶

Rendahnya pendapatan negara berkontribusi pada belanja negara yang irit dan tidak efektif dengan mengabaikan kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Angka kemiskinan yang tidak pernah turun secara signifikan, angka pengangguran terbuka tetap tinggi, kesehatan ibu dan anak memburuk, merupakan contoh-contoh akibatnya.

Selain itu, arus uang keluar ilegal melalui penghindaran pajak dan korupsi tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga memperburuk ketimpangan gender di Indonesia. Aksi! telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa perpajakan yang tidak berpihak pada perempuan telah menghambat program-program sosial yang seharusnya dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan, memperbaiki layanan publik dan menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih baik bagi perempuan.

Kajian yang dilakukan mengungkap bagaimana insentif perpajakan kepada korporasi sering kali tidak berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas, khususnya perempuan. Sebaliknya, insentif pajak yang tidak tepat sasaran justru memperbesar ketimpangan ekonomi dan sosial. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki pendapatan pajak, penerapan kebijakan perpajakan masih belum mampu menutupi kekurangan anggaran negara secara signifikan.

⁶ Rekayasa pajak adalah menghindari pajak dengan cara seperti misalnya, pengusaha menggaji dirinya dengan jumlah yang kecil dan segala kebutuhannya dikeluarkan lewat pengeluaran perusahaan sebagai biaya operasional (*tax engineering*)

II. PELUNCURAN HASIL KAJIAN DAN DISKUSI

Ketimpangan Gender dan Ekonomi dalam Politik Anggaran:

"Kajian dari sudut pandang perpajakan dan arus uang gelap"



Aksi! melihat menguatnya feminisasi kemiskinan yaitu makin banyak perempuan menjadi miskin diikuti oleh diskriminasi, eksploitasi tenaga kerja dan juga seksual, serta kekerasan. Aksi! melakukan diskusi di berbagai wilayah mengenai kemiskinan yang terjadi. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan negara untuk membiayai kesejahteraan dan perlindungan perempuan. Padahal, Indonesia adalah negara yang kaya baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Penyebab ketidakmampuan negara antara lain adalah utang negara semakin tinggi; kini sudah mencapai 8.560 triliun per Oktober 2024 . Utang yang tinggi menyebabkan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai di tahun 2025. Meskipun ada informasi bahwa hal tersebut kemungkinan tidak terjadi.

Aksi! merasa penting untuk menyorot persoalan perpajakan karena masyarakat membayar pajak tanpa mengerti kenapa dan untuk apa. Karenanya, Aksi! melakukan kajian mengenai pajak dan memaparkan hasil kajian tersebut agar mendapatkan masukan untuk memperkaya hasilnya. Selain itu kajian ini akan digunakan sebagai bahan untuk penyadaran lebih lanjut mengenai perpajakan.

Selanjutnya, 6 orang dari NGO/CSO memberi tanggapan sesuai dengan perspektif fokus isu masing-masing organisasi yakni;

Acara peluncuran buku ini dilaksanakan melalui tahapan, yaitu:

1. Pemaparan hasil kajian oleh dua pemapar dari Aksi!, yaitu Suwiryo Ismail dan Marhaini Nasution

2. Tanggapan dari enam orang dari NGO/CSO atas pemaparan hasil kajian, yaitu Jaya Darmawan dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Uli Arta Siagian dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Meliana Lumbantorum dari PWYP Indonesia, Danang Widoyoko dari Transparency International Indonesia (TII), Armayanti Sanusi dari Solidaritas Perempuan (SP) dan Samira Hanim dari The Prakarsa.
3. Pengumpulan masukan dari peserta yang dimoderatori oleh Risma Umar untuk memperkaya hasil kajian dan memperoleh saran untuk perbaikan hasil kajian.

1. Pemaparan Hasil Kajian

Kajian dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber dan metode, salah satunya adalah melakukan diskusi dengan kelompok perempuan di mana mereka melihat pajak sebagai sebuah beban.

Kajian ini menyorot tiga aspek penting, yaitu:

1. Mengapa negara tidak mampu mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada seperti pajak dan PNB, dan bahkan sumber fiskal tidak pernah mencapai target, dan bagaimana praktek-praktek korupsi, *money laundering*, dan berbagai kejahatan keuangan lainnya,—serta *illicit financial flows* (IFF) dapat menghambat pencapaian target fiskal.
2. Bagaimana negara mengatasi defisit anggaran APBN untuk memenuhi kepentingan perempuan dengan cara mendistribusikan anggaran yang proporsional dan berkeadilan, terutama dalam hal alokasi anggaran yang mendukung kepentingan perempuan dan pelestarian lingkungan?
3. Bagaimana negara menangani dampak yang dialami oleh banyak perempuan yang tidak mendapatkan layanan sosial baik karena defisit APBN maupun karena hancurnya berbagai ekosistem kehidupan di banyak tempat?

Secara historis, pajak memang memiliki akar ketidakadilan meskipun di dalamnya terdapat gagasan-gagasan yang dilandasi oleh semangat keadilan. Pajak, tidak hanya tidak mencapai jumlah yang sebanding dengan objek pajak, tetapi juga mengalami penggerusan melalui *illicit financial flows* maupun praktek korupsi dan *money laundering* serta berbagai modus seperti *illicit enrichment* (upaya memperkaya diri secara tidak wajar) dan *trading in influence* (upaya memperdagangkan pengaruh). Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) belum mengatur secara tegas praktek penggerusan ini.

Selama periode tahun 2017–2022 pajak merupakan penyumbang utama penerimaan negara. Namun penerimaan pajak dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai target, rata-rata hanya sekitar 78,24% per tahun. Hanya pada tahun anggaran tahun 2021 dan 2022 saja penerimaan bisa melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menyebut adanya penurunan dari jumlah yang dicapai, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Masih banyak warga negara yang tidak patuh dalam membayar pajak; namun pembayar pajak yang taat adalah orang miskin. Berdasarkan survei indikator politik Juni 2022, menunjukkan untuk tingkat kepatuhan wajib, angka perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Meskipun perempuan lebih sedikit memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) namun perempuan lebih taat menyampaikan SPT dan membayar pajak ketimbang laki-laki.

- 55,4% perempuan melaporkan SPT, laki-laki hanya 50,1%.
- 70,5% perempuan membayar pajak, laki-laki hanya 56,7%.
- 55,4% perempuan mengaku melaporkan SPT, sementara laki-laki hanya 50,1%.
- 31% laki-laki mengaku memiliki NPWP, perempuan hanya 23,9%.

UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah menetapkan klaster baru tarif pajak penghasilan progresif sebesar 35% untuk individu yang berpenghasilan di atas Rp 5 miliar. Klaster ini disebut *high net worth individuals* (HNWI) dengan kriteria wajib pajak yang memiliki kekayaan USD 1 Juta. Jumlah HNWI yang tercatat pada tahun 2022 mencapai 82.012 orang (0,1%) dari total wajib pajak. Walau demikian wajib pajak HNWI hanya menyumbang 0,96% dari total penerimaan pajak. Padahal wajib pajak pribadi karyawan justru menyumbang penerimaan pajak hingga 11%. Hal ini menunjukkan bahwa para karyawan biasa lebih banyak menanggung beban pajak dibanding dengan individu yang memiliki kekayaan besar.

Penghindaran pajak

Global Financial Integrity (GFI) pada tahun 2015 juga menyebutkan selang tahun 2004 - 2013, Indonesia mengalami kerugian karena penghindaran pajak sebesar USD 180,71 miliar atau setara Rp 2.100 triliun. Artinya, setiap tahunnya Indonesia kehilangan pendapatan sekitar Rp 210 triliun. Pada tahun 2016 GFI kembali melaporkan bahwa Indonesia kehilangan pendapatan pajak dan *royalty* sebesar USD 6,5 miliar atau setara dengan

Rp 62,86 triliun dari *trade misinvoicing* atau penyalahgunaan atau pemalsuan data tagihan dalam transaksi perdagangan internasional.

Hasil riset Prakarsa⁷ juga menyebutkan bahwa Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar USD 11,1 miliar atau setara dengan Rp 107,34 triliun selang tahun 1989-2017. Kehilangan ini bersumber dari praktik *trade mis-invoicing* pada enam komoditas ekspor unggulan, yakni minyak sawit (*CPO/crude palm oil*), batu bara, karet, tembaga, udang-udangan (*krustasea*), dan kopi. Indonesia juga kehilangan potensi pajak dari ekspor batu bara sebesar USD 5,32 miliar atau Rp 51,44 triliun; bahkan kehilangan potensi PNBPN dari penerimaan royalti batu bara dan tembaga dengan nilai total USD 2,96 miliar atau Rp 28,62 triliun selama kurun waktu tahun 2000-2017.

Mengapa pencapaian pajak tidak bertumbuh secara sehat dan progresif?

KPK sejak 2015 sudah mengingatkan bahwa pengelolaan sumberdaya alam memiliki potensi ekonomi yang tinggi, sekaligus potensi korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak yang tinggi. Namun selama beberapa tahun terakhir, masalah ini seperti tidak tersentuh dalam proses hukum.

Dalam Laporan Nota Sintesis Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GNP-SDA) 2018, KPK antara lain menyebutkan bahwa kerugian negara akibat penambangan liar misalnya, sudah mencapai Rp 35 triliun per tahun. Selama periode tahun 2003-2014, sekitar 77% hingga 81% potensi produksi kayu bulat tidak tercatat, sehingga negara dirugikan antara Rp 5,24 triliun hingga Rp 7,24 triliun per tahun.

Pelaksanaan konversi hutan untuk sektor lain melalui izin pemanfaatan kayu (IPK), juga menimbulkan potensi kerugian negara antara Rp 49,8 triliun hingga Rp 66,6 triliun per tahun di periode yang sama. Selain itu, terdapat kekurangan pada bayar pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp 15,9 triliun pertahun di tiga pulau yaitu Kalimantan, Sumatera dan Papua. KPK juga mencatat ada sekitar Rp 28,5 triliun potensi penerimaan yang hilang akibat persoalan administratif dan buruknya sistem perizinan, serta lemahnya sistem kontrol penerimaan negara.

Negara juga mengalami kerugian dari potensi PDB sektor kelautan/perikanan sebesar Rp 70 triliun per tahun. Tidak sebanding

⁷ Mengungkap Aliran Keuangan Gelap Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia: Besaran dan Potensi Hilangnya Penerimaan Negara, Perkumpulan Prakarsa, 2019.

dengan PNBP yang saat itu hanya Rp 230 miliar per tahun. Meski sudah diperingatkan oleh KPK, namun hingga tahun 2020 pencapaian PNBP sektor perikanan hanya naik di angka Rp 957,10 miliar.

Mengobral insentif pajak, menyelamatkan sektor bisnis

Sejak tahun 2017 pemerintah secara terus menerus menaikkan insentif atau belanja pajak untuk memanjakan sektor bisnis melalui pengurangan dan pembebasan tarif pajak. Akumulasi besarnya insentif pajak sejak tahun 2017-2022 adalah sebesar Rp1.571,9 triliun. Dari sisi fungsi belanja pemerintah, menjadi satu-satunya insentif terbesar sepanjang tahun 2017-2022. Menurut pemerintah Indonesia, kenaikan insentif pajak dan dukungan khusus pada korporasi dan UMKM dilakukan untuk mencegah kebangkrutan, menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi tetap berjalan.

Penegakan hukum yang lemah

Hingga tahun 2022, pemerintah masih bersikap ambigu bahkan secara sistemik memberikan insentif atau subsidi terselubung kepada berbagai badan usaha atau korporasi yang tidak hanya bermasalah dengan pajak tetapi juga bermasalah dengan lingkungan maupun masyarakat. Temuan KPK dan pandangan berbagai ahli mengenai kasus-kasus penghindaran pajak dan keterkaitan pajak dengan korupsi dan pencucian uang, sudah sering diungkapkan ke publik. Namun proses penegakan hukum masih berjalan lambat, meski sejumlah orang telah atau sedang dipidanakan.



Potret kebijakan negara dalam mendistribusikan kekayaan dan hasil pajak dan PNB

Pada tahun 2022, PPN meningkat dari 10% menjadi 11% sehingga berdampak antara lain terhadap beban ekonomi perempuan dan keluarganya. Perempuan miskin juga rentan terhadap dampak inflasi, karena apabila pajak meningkat maka kebutuhan meningkat sehingga perempuan sulit mengatur keuangan keluarga dan bahkan harus mengurangi porsi makan keluarga. Perempuan miskin lebih rentan terhadap dampak inflasi. Hal ini dapat dilihat pada masa COVID dengan terjadinya inflasi namun daya beli masyarakat menurun. Tahun 2024 terjadi deflasi karena daya beli masyarakat menurun akibat kehilangan

mata pencaharian. Kenaikan harga pangan menyebabkan perempuan harus menyesuaikan pola makan keluarga, mengurangi pembelian makanan bergizi dan porsi makan, dan sebagainya.

Sistem pajak dan pengelolaan anggaran negara yang tidak adil dan tidak efektif berdampak pada berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, perlindungan lingkungan dan investasi, sehingga perlu dilakukan reformasi untuk meningkatkan akses ke layanan dasar untuk mengakhiri ketimpangan gender, ekonomi dan sosial.

Bidang Pendidikan

- Anggaran bidang pendidikan rata-rata 20%; namun anggaran yang tersedia belum meningkatkan kualitas pendidikan
- Human Capital Indeks (HCI) Indonesia mendapatkan skor 0,54 (tahun 2020) di bawah rata-rata ASEAN: ukuran dilihat dari kemampuan untuk bertahan hidup sampai usia sekolah, harapan lama sekolah atau lamanya sekolah, kesehatan/stunting
- Indonesia mencatatkan skor *Programme for International Student Assessment* (PISA) yang rendah menurut laporan OECD yang diukur berdasarkan matematika, sains dan membaca
- Tingkat partisipasi Perguruan Tinggi terendah se-ASEAN
- Angka korupsi yang tinggi di sektor Pendidikan; pada 2005-2016 terdapat 423 kasus korupsi di sektor pendidikan
- Sekitar 16,09% perempuan berusia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah, laki-laki sebesar 11,65%. Sebanyak 5,35% perempuan berusia 15 tahun ke atas buta huruf, sedangkan laki-laki hanya sebesar 2,57%. (BPS 2021)
- Rata-rata lama sekolah masih sangat rendah, yaitu hanya 8,3 – 8,5 tahun atau setara sampai kelas 2 SMP. Akibat rendahnya pendidikan perempuan, mereka sulit mendapatkan pekerjaan dan lebih banyak bekerja di sektor informal dengan waktu kerja yang panjang, upah rendah murah, dan tidak terlindungi.
- Berdasarkan hasil konsultasi di 10 kota yang diselenggarakan oleh Aksi!, hambatan perempuan dalam mendapatkan pendidikan adalah karena (1) tidak memiliki biaya, (2) tidak diizinkan sekolah, (3) tidak diizinkan untuk memilih sekolah.
- Kualitas pendidikan di sekolah perempuan yang rendah dapat menyebabkan rendahnya kemampuan dan keterampilan mereka, sehingga membatasi jaringan dan kesempatan mereka untuk berkembang di masa depan. Ini dapat berdampak pada kemampuan

mereka untuk mengakses informasi, memperoleh pekerjaan yang layak, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

- Anak keluarga kaya memiliki masa depan yang lebih menjanjikan karena kapasitas dan jaringan sosial yang kuat; sementara anak keluarga miskin berpotensi terus menerus miskin karena kapasitas dan jaringan sosial yang lemah



Bidang Kesehatan

- Anggaran kesehatan rata-rata sebesar 5-6% setiap tahunnya. Alokasi anggaran tersebut sangat kecil untuk menangani persoalan kesehatan yang begitu memprihatinkan di Indonesia dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang tersebar.
- Anggaran yang tersedia belum mampu mengatasi masalah kesehatan perempuan dan anak yang ditunjukkan lewat;
 - (1) Tingginya kematian ibu dan anak, AKI di Indonesia sampai tahun 2019 masih mencapai angka 305 per 100.000 kelahiran hidup.

Artinya, ada sekitar 305 orang ibu yang meninggal dalam 100.000 kelahiran hidup,

- (2) Rendahnya kualitas hidup perempuan. Untuk Angka Kecukupan Gizi (AKG), 40% masyarakat tidak cukup gizi, yaitu sekitar 1.738 kkal per-kapita per hari. Angka ini di bawah standar AKG sebesar 2.100 kkal. (BPS 2022).
 - (3) Stunting (kerdil) mencapai 30% dari total jumlah anak di Indonesia
- Harga obat di Indonesia yang termasuk paling mahal se-ASEAN.
 - Persoalan kesehatan di Indonesia masih menjadi perhatian serius, seperti yang ditunjukkan oleh rendahnya capaian indikator kesehatan global. Beberapa indikator yang menunjukkan hal ini adalah: (1) Rasio dokter di Indonesia yang masih jauh di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk. Pada tahun 2019, rasio dokter di Indonesia hanya mencapai 1 dokter per 19.000 penduduk, dengan distribusi yang sangat tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini menyebabkan banyak daerah pedesaan dan ribuan pulau tidak memiliki akses ke dokter, sehingga membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. (2) Indeks Pelayanan Kesehatan (Health Care Index) yang rendah, seperti yang ditunjukkan oleh rasio tempat tidur rumah sakit sebesar 1,38 per 1.000 penduduk dan ketersediaan Puskesmas sebesar 1,4 per 100.000 penduduk. Hal ini menunjukkan kekurangan fasilitas kesehatan primer yang memadai, sehingga masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. (3) Indeks Kesehatan (Wellness Index) yang mencakup aspek fisik, mental, lingkungan, dan sosial juga menunjukkan hasil yang perlu diperbaiki. Meskipun data spesifik tentang indeks ini tidak tersedia, namun beberapa indikator kesehatan lainnya menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.
 - Akses ke pelayanan kesehatan di pedalaman dan kepulauan masih sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari jumlah rumah sakit dan tenaga medis yang sedikit, maupun banyak kasus-kasus perempuan meninggal saat melahirkan.



Bidang Perlindungan sosial

- Anggaran untuk perlindungan sosial hanya sekitar 12%-15%
- Belum dapat mengurangi angka kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan gender.
- Indonesia mengalami laju penurunan tingkat kemiskinan yang sangat lambat sejak 1999 hingga saat ini. Laju penurunannya juga tidak berjalan sesuai dengan target pada RPJMN tahun 2015-2019 sebesar 7,0-8,0%, dan RPJMN tahun 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5%
- Indonesia berada pada urutan ke 7 tertinggi untuk tingkat ketimpangan, di mana 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 36,6% kekayaan nasional.
- Masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan perlindungan sosial (perlinsos)

- Perlindungan sosial (Perlinsos) memberikan bantuan minimalis untuk meredakan gejolak sosial, tanpa memberdayakan masyarakat miskin secara efektif, dan dipahami masyarakat hanya sebagai bantuan sosial seperti PKH, BLT, BOS, BPNT dan lainnya, sehingga tidak mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan. Selain itu, Perlinsos juga belum menjangkau masyarakat yang terkena dampak lingkungan akibat proyek pembangunan, seperti penggusuran dan kehilangan lahan tanpa ganti rugi yang adil. Berdasarkan hasil konsultasi di 10 kota yang dilaksanakan Aksi! ditemukan bahwa program Perlinsos gagal memberikan perlindungan pada masyarakat yang terkena dampak langsung akibat konflik SDA, seperti penggusuran, perampasan lahan, dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Akibatnya, masyarakat yang paling membutuhkan bantuan justru tidak menerima manfaatnya, sehingga program ini tidak efektif dalam mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial di wilayah konflik SDA.
- Masih banyak perempuan kelas bawah yang sulit mengakses program perlindungan sosial karena tidak memiliki administrasi kependudukan (Admuduk), salah sasaran, pencatatan penerima bantuan, dan masyarakat yang menentang dampak buruk proyek pembangunan. Antara lain buruh perempuan pekerja informal tidak memiliki jaminan kesehatan karena orang bekerja dianggap bisa membayar jaminan kesehatan. Akibatnya, buruh perempuan pekerja informal tidak dapat mengakses program kartu Indonesia sehat (KIS)
- Perlindungan maternitas tidak maksimal dilakukan baik lewat KIS maupun BPJS Kesehatan mandiri.



Bidang Investasi dan Pengangguran

- Pemerintah memberikan insentif dan subsidi ke swasta untuk meningkatkan investasi, namun hasilnya tidak signifikan dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Realisasi investasi pada 2020 mencapai Rp826,3 triliun, namun penyerapan tenaga kerja hanya sekitar 235.401 - 384.892 orang.
- Investasi lebih banyak pada teknologi tinggi, bukan padat karya, sehingga tidak berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Angka pengangguran terbuka masih tinggi, yaitu 7,07% atau sekitar 2,68 juta orang, jauh dari target pemerintah.

Perlindungan Lingkungan dan Ruang Hidup Perempuan

- Pengelolaan pajak dan PNPB yang tidak transparan dan korup dapat memperburuk kerusakan lingkungan dan memperparah kondisi perempuan.

- Insentif pajak untuk perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan dapat mempercepat penghancuran ruang hidup perempuan.
- Selama 2021, ada 58 kasus kriminalisasi yang terjadi di berbagai kawasan, ada 52% di antaranya adalah kriminalisasi di kawasan pertambangan, diikuti kriminalisasi di sektor kehutanan dan perkebunan sebesar 34%. Ada 3.033 lubang bekas tambang batubara yang dibiarkan terbuka tanpa dilakukan rehabilitasi atau pemulihan. Ada 143 anak meninggal di bekas lubang tambang, di antaranya 37 anak meninggal di bekas tambang batubara (2020) di Kalimantan Timur.
- Perempuan kehilangan sumber-sumber konsumsi, obat-obatan, dan bahan kerajinan akibat alih fungsi hutan dan pertambangan yang didukung oleh kebijakan pajak yang tidak adil.

2. Tanggapan dari Penanggap



Jaya Darmawan – CELIOS

- Aksi! mencoba mengkaji APBN secara luas serta menghubungkan fiskal dengan ketimpangan gender dan ekonomi terutama dengan data yang tidak mudah didapatkan
- Hal ini sejalan dengan apa yang publikasikan oleh CELIOS mengenai ketimpangan di Indonesia
- Permasalahan ketimpangan gender identik dengan ketimpangan terkait gaji, yaitu akar permasalahannya adalah tingkat pendidikan yang menyebabkan gaji perempuan lebih sedikit daripada laki-laki
- Salah satu aspek lainnya masalah adalah biaya. Negara sudah seharusnya menganggarkan pendidikan gratis yang lebih luas. CELIOS melihat bahwa Indonesia mampu memberikan pendidikan gratis dengan mengefisiensi anggaran negara
- Dari sisi budaya, yang belum dikaji adalah angka pernikahan anak yang merupakan tantangan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi. Jadi, penting untuk melihat wilayah yang angka pernikahan anak tinggi
- Perlinsos adalah hak semua orang dan substansial. Alih-alih meningkatkan belanja untuk perlinsos, negara lebih tertarik dan berfokus pada meningkatkan anggaran keamanan negara yang

seringkali rentan terhadap penyalahgunaan dan korupsi.

- Negara sebagai pembuat anggaran dan DPR sebagai pengawas anggaran, serta masyarakat pemantau, untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

Meliana Lumbantoruan – Publish What You Pay (PWYP)

- Hasil kajian Aksi! memiliki ruang lingkup luas di mana banyak hal yang dimasukkan sehingga bisa menjadi referensi atau bacaan awal bagi kaum awam
- Perlu memperdalam sub-tema sehingga masing-masing bab dapat diperdalam lebih lanjut
- Hasil kajian dilakukan pada tahun 2023, maka perlu diperbaharui dengan situasi pemerintahan sekarang. Perlu ditambahkan rekomendasi yang dapat diberikan ke pemerintahan baru dengan melihat kajian dari tahun 2017-2022
- Program Asa Cipta nomor 7 yang diajukan Prabowo-Gibran, adalah komitmen mengenai perpajakan. Oleh sebab itu, perlu dipelajari kembali seperti penurunan PPh dan pembebasan pajak bagi UMKM yang baru dibentuk 2 tahun terakhir
- Tren pajak di Indonesia sebesar 10% namun Prabowo-Gibran menargetkan 23%, apakah hal ini memungkinkan?
- Ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi, di mana semakin tinggi ketimpangan gender maka pertumbuhan ekonomi menurun
- Di Singapura ada insentif pajak untuk perempuan yang melahirkan. Di Afrika pembebasan pajak untuk popok bayi, sedangkan di India untuk pembalut. Perempuan di negara berkembang membeli bahan-bahan esensial. Artinya, perlu mendorong pajak yang ramah gender untuk memastikan ketersediaan produk-produk esensial bagi perempuan

Uli Arta Siagian – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nasional

- WALHI penting melihat pajak dalam konteks SDA, baik pengelolaan maupun perlindungan untuk sumber-sumber kehidupan masyarakat.
- Perempuan sering kali diabaikan peran, pengetahuan, dan pelibatan proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) sehingga kepentingan mereka tidak terwakili dalam membahas anggaran.
- Dalam liberalisasi sumberdaya alam, pemerintah dengan mudah memberikan izin yang sebesar-besarnya kepada perusahaan yang dapat menyebabkan terjadinya pembocoran pajak dan korupsi karena

jumlah perijinan tinggi tidak sebanding dengan jumlah pengawasan serta penegakan hukumnya tidak memadai. Pembocoran tidak hanya dalam konteks pajak tetapi juga terjadi dalam proses perizinan di hulu yang berpotensi kehilangan pendapatan negara yang signifikan.

- Meskipun pemerintah memberikan banyak insentif kepada perusahaan di Indonesia, tetapi insentif tersebut tidak berdampak pada penurunan harga bagi masyarakat, karena harga barang dan jasa tetap meningkat.
- Banyak perusahaan yang tidak membayar pajak karena tidak memiliki izin hak guna usaha (HGU) atau beroperasi ilegal di dalam kawasan hutan. Hal ini terjadi karena minimnya pengawasan
- Proporsi anggaran untuk keamanan, pertahanan dan infrastruktur seringkali dipergunakan untuk menekan atau 'membungkam' masyarakat yang melawan.
- Infrastruktur tidak memfokuskan pada wilayah terpencil
- Ekstraksi SDA sangat banyak menghasilkan uang, namun justru di tempat ekstraksi tersebut masyarakat mengalami kemiskinan, terjadi kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Tetapi di lain pihak penganggaran pengawasan dan perlindungan serta penegakan hukum sangat kecil

Armayanti Sanusi – Solidaritas Perempuan (SP)

- Untuk melihat ketimpangan gender dalam politik fiskal, perlu membongkar struktur dan relasi kuasa baik di negara dan masyarakat
- Negara mengadopsi sistem sosial budaya patriarki dalam kebijakan-kebijakannya
- UU No. 36 mengenai PPh menyebutkan unit keluarga di mana laki-laki sebagai penyedia ekonomi keluarga
- Konstruksi patriarki memposisikan peran perempuan untuk menyediakan sandang dan pangan keluarga. Akibatnya, PPh tentunya berpengaruh pada perempuan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga
- Beban pajak ke masyarakat tinggi, namun tidak jelas pendistribusiannya terutama untuk pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan sosial.
- UU Cipta Kerja yang mendorong peningkatan investasi dan mempengaruhi aturan turunan yang memastikan kemudahan investasi untuk sektor ekstraktif dan energi. Proyek-proyek investasi menyebabkan meningkatnya feminisasi kemiskinan, pelanggaran hak, dan kekerasan terhadap perempuan (contohnya di dalam konflik agraria)

Samira Hanim – The PRAKARSA

- Kajian ini penting karena masih sedikit kajian mengenai relasi pajak dan fiskal dengan ketimpangan gender
- Kenapa organisasi perempuan harus belajar pajak? Kenapa perempuan harus mengetahui pajak? Hal ini memperlihatkan masih rendahnya pengetahuan tentang pajak yang dikuasai perempuan. Oleh sebab itu, penting dijadikan rekomendasi
- Aksi perlu terus meningkatkan pemahaman mengenai pajak dan ekonomi secara umum bagi perempuan. Selanjutnya, perlu strategi peningkatan kapasitas perempuan akan ekonomi formal
- Ketika Indonesia diundang dalam presidensi G20. Maret 2022, OECD mengundang Asisten Kementerian Keuangan dan beberapa tokoh dari OECD untuk membahas keterkaitan gender dan Tax. Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa ada 3 aspek yang dikaji yaitu peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan juga kepemimpinan untuk perempuan, juga peningkatan akses ekonomi yang meningkatkan kesempatan dan training untuk perempuan. Dari tahun 2022 sampai sekarang masih belum terlihat dampak dari target-target tersebut untuk perempuan
- Ketika menjabarkan ekonomi dan pajak di Indonesia, terdapat 3 garis besar yaitu pajak penghasilan, pajak atas penjualan, dan pajak atas kepemilikan.
- Ketimpangan Pajak Penghasilan yang dapat terlihat adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) hanya dikenakan ke laki-laki. Ketika perempuan memilih NPWP terpisah, maka tidak dikenakan PTKP. Hal ini berbeda dengan negara lain, seperti Singapura yang mengurangi PTKP 2 kali ketika perempuan melahirkan
- Masyarakat miskin sangat patuh pajak tetapi justru mendapatkan manfaat sedikit dari pajak tersebut. Namun pajak sebenarnya bersifat objektif dan tidak melihat perbedaan antara perempuan dan laki-laki, namun faktanya menunjukkan bahwa perempuan berkontribusi lebih besar dibanding laki-laki dalam perekonomian terutama dari pola konsumsi.
- Pajak kepemilikan adalah mengenai kepemilikan aset. Ketika perempuan menikah maka aset tersebut cenderung berada di bawah kepemilikan laki-laki sebagai kepala keluarga
- Perempuan di Indonesia banyak yang bekerja di sektor informal, yang mengakibatkan mereka kesulitan mengakses kredit karena perbankan cenderung tidak mendukung pekerja informal. Sementara itu, negara seperti Nepal telah memberlakukan kebijakan yang lebih mendukung perempuan, seperti pembebasan pajak untuk kepemilikan properti,

yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan ekonomi mereka.

- Ketika berbicara ketimpangan gender dan pajak, harus melihat apakah perempuan mendapatkan fasilitas atau manfaat dari pajak tersebut. Dari pemasukan pajak di Indonesia, penerima manfaat pajak adalah orang kaya yang sebenarnya sudah tidak memerlukan atau mendapatkan bantuan. Namun nyatanya, kelompok inilah yang banyak mendapatkan manfaat dari pajak

Danang Widoyoko – Transparency International Indonesia (TII)

- Topik hasil kajian yang dilakukan oleh Aksi! merupakan topik berat dan luas, baik dari mengkaitkan fiskal ke IFF ke kemiskinan dan ketimpangan gender. Jadi topik ini akan selalu aktual
- Apa bedanya petugas pajak dengan preman? Esensinya sama yaitu meminta uang dengan unsur pemaksaan. Ketika memungut pajak, dipertanyakan sejauh mana kapasitas dan kemampuan negara, termasuk pengawasannya
- Ekonomi di Indonesia mengarah dari liberalisasi ke arah nasionalisasi dengan melihat kepemilikan negara untuk meningkatkan bagi hasil negara. Perusahaan-perusahaan dinasionalisasi untuk meningkatkan penghasilan dan bagi hasil negara
- Hilirisasi sebenarnya dalam bentuk nasionalisasi ekonomi di mana yang mendapatkan manfaat adalah kelompok nasionalis. Tetapi pada akhirnya banyak perusahaan internasional yang mendapatkan fasilitas tersebut
- Negara seharusnya mendapatkan penerimaan pajak keuntungan tidak terduga (windfall tax) dari keuntungan perusahaan ketika harga komoditas melonjak. Namun, ketika harga minyak goreng naik drastis dan barang langka sehingga masyarakat dirugikan, pemerintah pun tidak dapat mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut.
- Perlu memahami bahwa negara memiliki permasalahan dalam hal perpajakan, terutama mengenai regulasi untuk monitoring, dan menjatuhkan sanksi atau hukuman
- Jika ekonominya kuat, porsi yang terbesar itu bukan berasal dari PPn tetapi PPh
- *Grand border corruption* adalah korupsi yang terjadi di sektor ekspor-impor perdagangan. Hal ini terjadi bahkan dari awal kemerdekaan hingga sekarang. Tidak ada keberanian maupun kapasitas pemerintah untuk melakukan perubahan seperti mengubah kuota menjadi tarif

- Kondisi *financial flow* tergantung pada kapasitas negara. Negara seperti Singapura dan Cina memperhatikan fasilitas untuk aspek kesehatan apabila terjadi peningkatan jumlah kematian dan menurunnya jumlah kelahiran. Namun, dalam sistem pendidikan, sekolah bukan hanya berfungsi sebagai tempat mencari pengetahuan dan memberikan pendidikan, tetapi juga telah menjadi sarana untuk mencari keuntungan finansial, memperoleh pengaruh politik, dan memperluas kekuasaan.
- Administrasi pajak dengan gender. Perempuan yang sudah menikah lebih sulit memperoleh NPWP sehingga lebih banyak perempuan memilih masuk ke NPWP suami. Di sini terlihat problem struktural pada sistem perpajakan
- Perlu cerita-cerita mengenai orang yang mengalami permasalahan atau situasi yang terjadi. Seperti pernikahan dini, tidak bersekolah, dan lain-lain. Di hasil kajian Aksi! perlu memasukan cerita dari perempuan, tidak cukup angka statistik saja

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Negara memungut pajak dari rakyat, namun bukan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Negara melakukan eksploitasi lingkungan, kehidupan dan sumberdaya alam milik rakyat, maupun menghancurkan atau membiarkan terjadinya penghancuran atas ruang-ruang kehidupan banyak orang. Negara juga terlihat enggan atau bahkan tidak mampu mengembalikan bagian yang adil kepada rakyat dan lingkungan. Bahkan negara tidak mampu memelihara dan memulihkan ekosistem kehidupan untuk keberlanjutan kehidupan semua makhluk secara adil.

Munculnya berbagai ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan maupun berbagai kelompok rentan lainnya bersumber dari proporsi anggaran kesejahteraan sosial dan pemulihan maupun pemeliharaan lingkungan yang timpang. Dengan berbagai dampak berlapis akibat ketidakadilan tetapi tidak tertangani secara adil. Oleh karena itu, Aksi! menilai penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan negara dalam mengelola fiskal, terutama dalam mengelola sumber-sumber pembiayaan dan mengalokasikan biaya yang bersumber dari kekayaan alam maupun penyelenggaraan berbagai aktivitas ekonomi.



Rekomendasi dari hasil diskusi peluncuran kajian ketimpangan pajak dan gender di Indonesia adalah:

- Perluasan dan pendalaman kajian lebih lanjut, termasuk tema-tema yang direkomendasikan
- Memastikan pengawasan terhadap anggaran negara, termasuk distribusi dan alokasi pajak
- Pentingnya kesadaran akan pajak menjadi gerakan agar dapat menyorot pada permasalahan struktural yang menyebabkan ketidakadilan akibat lemahnya negara dalam pengawasan atas sumber kehidupan masyarakat yang sering dijadikan objek ekstraksi dan tumpuan ekonomi
- Memunculkan potret perempuan dan kelompok rentan, serta melibatkan korban yang terkena dampak langsung sebagai peneliti
- Penting untuk mendorong pajak berkeadilan di gerakan kelas menengah untuk mengkritisi pajak. Sebab, yang berpotensi untuk mendorong perubahan adalah kelas menengah. Kelas menengah cenderung terdidik dan penghasilannya sedikit mapan; kelas menengah harus berafiliasi untuk protes terhadap ketidakadilan dan pemiskinan. Untuk mengatasi ketimpangan bukan dijawab dengan bansos tetapi dengan pemberdayaan ekonomi



for gender, social and ecological justice

Aksi for gender, sosial, dan ecological justice terlibat secara kritis dalam perdebatan dan diskursus mengenai kebijakan pembangunan dan perubahan iklim untuk memastikan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, hak-hak perempuan, serta hak-hak masyarakat terdampak, serta mendukung aksi perempuan akar rumput untuk mewujudkan keadilan gender, sosial, dan ekologi.



aksiforjustice.id



Aksi!
for gender, social and ecological justice



Co-funded by
the European Union

